Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

KontraS

Edisi Melawan Lupa

INILAH PENCULIK AKTIVIS 1998

dan inilah Korbanya

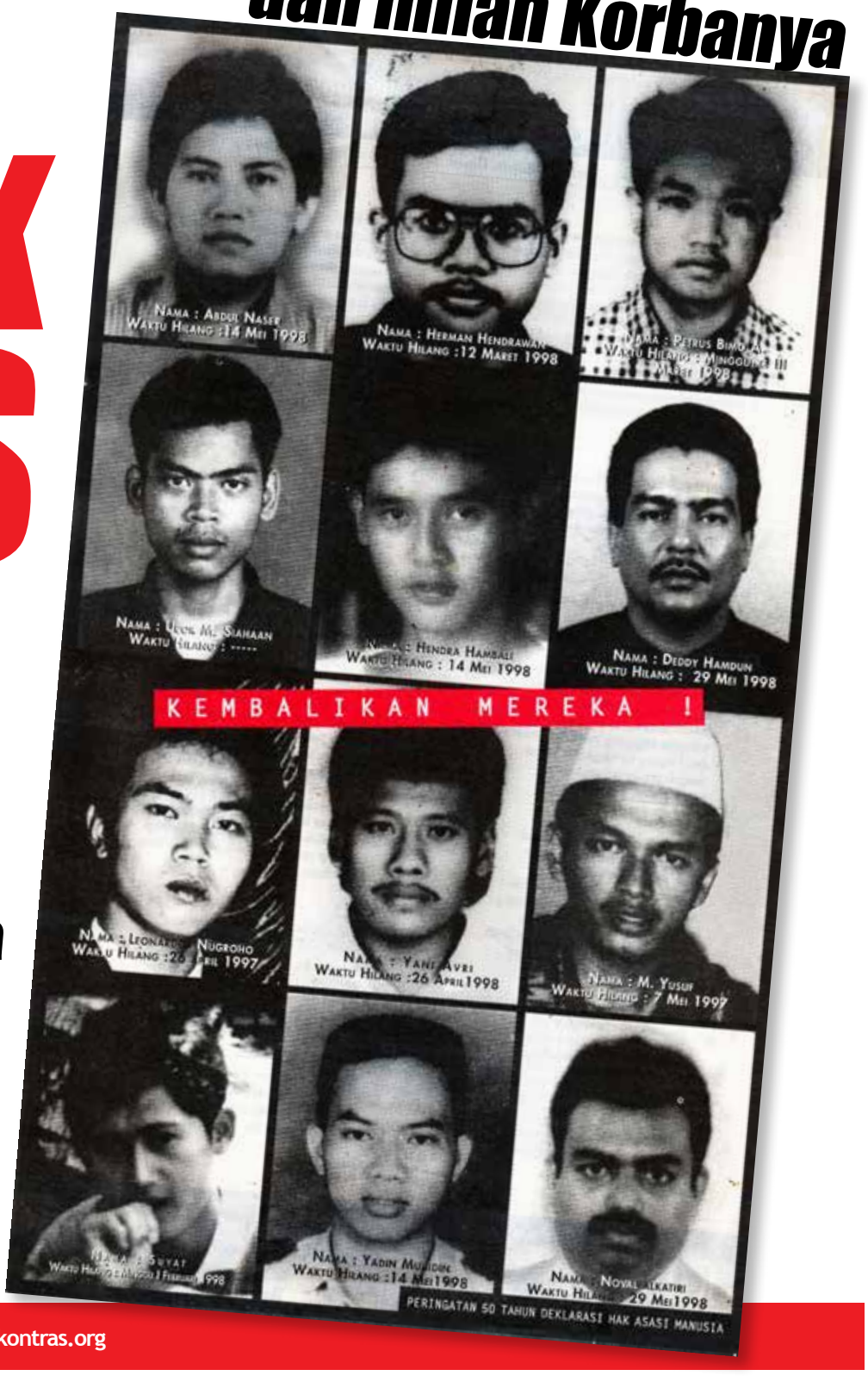

Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998:

Siapa Bertanggungjawab?

Redaksi KONTRAS, Jl Borobudur No. 14 Menteng Jakarta 10320 Indonesia I www.kontras.org

Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998: Siapa Bertanggungjawab?

"Tolong berikan kepastian pada kami...jika anak-anak kami masih hidup, dimana mereka? Jika sudah meninggal, dimana kuburannya?" ***[Nurhasanah – Orang Tua Yadin Muhidin]***

Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998, terjadi pada masa pemilihan Presiden Republik Indonesia [Pilpres], untuk periode 1998-2003. Pada masa itu, terdapat dua agenda politik besar; pertama, Pemilihan Umum (Pemilu) 1997. Kedua, Sidang Umum (SU) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada bulan Maret 1998, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden RI, yang pada saat kasus ini terjadi, presiden RI masih dijabat oleh Soeharto.

Kasus penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa, menimpa para aktivis, pemuda dan mahasiswa yang ingin menegakkan keadilan dan demokrasi di masa pemerintahan Orde Baru. Mereka yang kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah dianggap sebagai kelompok yang membahayakan dan merongrong kewibawaan negara. Gagasan-gagasan dan pemikiran mereka dipandang sebagai ancaman yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan.

SEMBILAN (9) ORANG KORBAN
YANG BERHASIL KEMBALI DARI PENCULIKAN

No	Nama Korban	Tanggal Hilang	Keterangan
1	Aan Rusdiyanto	13 Maret 1998	Diambil paksa di rumah susun Klender, Jakarta Timur
2	Andi Arief	28 Maret 1998	Diambil paksa di Lampung
3	Desmond Junaedi Mahesa	3 Februari 1998	Jakarta / Terakhir terlihat di Salemba Jakarta Pusat
4	Faisol Reza	12 Maret 1998	Dikejar dan ditangkap di RS Ciptomangunkusumo Jakarta Pusat
5	Haryanto Taslam	8 Maret 1998	Saat mengendarai mobil dikejar dan ditangkap di pintu TMII
6	Mugiyanto	13 Maret 1998	Diambil paksa di rumah susun Kelender Jakarta Timur
7	Nezar Patria	13 Maret 1998	Diambil paksa di rumah susun Klender, Jakarta Timur
8	Pius Lustrilanang	4 Februari 1998	Jakarta / Terakhir terlihat di RSCM Jakarta Pusat
9	Raharja Waluya Jati	12 Maret 1998	Dikejar dan ditangkap di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta-Pusat

TIGA BELAS (13) ORANG KORBAN
YANG MASIH HILANG DAN BELUM DIKEMBALIKAN

No	Nama Korban	Tanggal Hilang	Keterangan
1	Dedy Umar Hamdun	29 Mei 1997	Jakarta / Terakhir terlihat di Tebet
2	Herman Hendrawan	12 Maret 1998	Jakarta / Terakhir terlihat di Gedung YLBHI
3	Hendra Hambali	14 Mei 1998	Jakarta / Terakhir terlihat di Glodok Plaza
4	Ismail	29 Mei 1997	Jakarta / Terakhir terlihat di Tebet
5	M Yusuf	7 Mei 1997	Jakarta / Terakhir terlihat di Tebet
6	Noval Al Katiri	29 Mei 1997	Jakarta
7	Petrus Bima Anugrah	1 April 1998	Jakarta / Terakhir terlihat di Grogol
8	Sony	26 April 1997	Jakarta / Terakhir terlihat di Klapa Gading
9	Suyat	13 Februari 1998	Jakarta / Terakhir terlihat di Solo, Jawa Tengah
10	Ucok Munandar Siahaan	14 Mei 1998	Jakarta / Terakhir terlihat di Ciputat
11	Yadin Muhidin	14 Mei 1998	Jakarta / Terakhir terlihat di Sunter Agung
12	Yani Afri	26 April 1997	Jakarta / Terakhir terlihat di Klapa Gading
13	Wiji Tukul	Pada kisaran akhir 1998 / awal 1999	Jakarta / Terakhir terlihat di Utan Kayu

PELAKU PENCULIKAN
DAN PENGHILANGAN PAKSA AKTIVIS 1997-1998

TIM MAWAR

Tim Mawar merupakan sebuah tim yang dibentuk dibawah Grup IV Komando Pasukan Khusus [KOPASSUS], berdasarkan perintah langsung dan tertulis dari Komandan Jenderal [Danjen] Kopassus Mayjen TNI Prabowo Subianto. Perintah tersebut diberikan kepada Komandan Grup 42, Kopassus, Kolonel Chairawan, yang selanjutnya dilanjutkan kepada Komandan Batalyon 42, Mayor Bambang Kristiono. Kebijakan dan praktik penghilangan paksa, dilanjutkan pada kepemimpinan Mayjen. TNI. Muchdi Pr dimana penculikan tetap berlangsung. [***Sumber Laporan Tim Ad Hoc KPP HAM Yang Berat PPOSP 1997-1998 Hal. 301***]

Berdasarkan waktu dibentuknya Tim Mawar, yaitu Juli 1997, maka terhadap korban-korban lain yang ditahan sebelum bulan tersebut, dimungkinkan adanya Tim Lainnya atau personel yang telah dibentuk atau ditunjuk secara institusinal oleh Kopassus. Terjadinya penahanan baik sebelum dibentuknya Tim Mawar dan dalam dua kepemimpinan dari Mayjen. TNI. Prabowo kepada Mayjen. TNI. Muchdi Pr. Hal ini menunjukan bahwa tindakan penghilangan orang secara paksa atau penculikan merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan sebuah kebijakan secara institusional dibawah tanggungjawab Danjen Kopassus. [***Sumber Laporan Tim Ad Hoc KPP HAM Yang Berat PPOSP 1997-1998 Hal. 302***]

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

Iklan (021) 5367909
Layanan Pelanggan (021) 23679000
Harga langganan Rp 98000,–
Harga eceran Rp 4.500,–

Wiranto: Penculikan Inisiatif Prabowo Sendiri

Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis (19/6). Wiranto menanggapi jawaban atas 10 pertanyaan seputar keterlibatan dia dengan polemik Dewan Kehormatan Perwira yang memeriksa mantan Pangkostrad dan Danjen Kopassus Prabowo Subianto dalam kasus penculikan aktivis pada 1998.

News / Nasional

Wiranto: Prabowo Terbukti Terlibat Penculikan, Jangan Terjebak Istilah

Kamis, 19 Juni 2014 | 14:11 WIB

...a, Wiranto saat deklarasi mengusung Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pasangan capres-...ediaman Megawati Soekarnoputri, Jakarta, 19 Mei 2014. PDIP, PKB, Partai Nasdem, dan Partai ...engusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

KOMPAS IMAGES / KRISTIANTO PURNOMO

SATU LAGI TERCATAT DALAM LAPORAN KPP HAM KOMNAS HAM

KORBAN YANG MASIH HILANG ATAS NAMA:

ABDUL NASER, Hilang 14 Mei 1998, Terakhir terlihat di Karawaci

KORBAN YANG DITEMUKAN MENINGGAL DUNIA

LEONARDUS NUGROHO (sapaan akrabnya Gilang): Ia adalah seorang aktivis, yang berprofesi sebagai pengamen jalanan, sering terlibat dalam banyak kegiatan mengkritisi kebijakan pemerintah Orde Baru, bersama aktivis mahasiswa di Yogyakarta dan Solo. Ia hilang pada bulan April 1998 di Solo. Tiga hari kemudian ia ditemukan meninggal di Magetan Jawa Timur dengan luka tembakan ditubuhnya.

KOMPAS
Prabowo Diberhentikan
* Muchdi dan Chairawan Bebas Tugas
Dibayangi Aksi Protes
Fenomena Megawati
IFC Incar Bank Swasta

HASIL DAN KESIMPULAN PENYELIDIKAN KOMNAS HAM

Pada 1 Oktober 2005 membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM berat pada Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 yang bertugas melakukan penyelidikan proyustisia berdasarkan Undang-Undang No 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Hasilnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS-HAM) menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998. Adapun Kesimpulan laporan penyelidikan KOMNAS HAM, sebagai berikut:

"Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakan pada tingkat pengendalian dan penanggung jawab komando terdiri dari TNI sebanyak 20 (dua puluh) orang dan Polisi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu:

Mayjen TNI Prabowo Subianto
Selaku Danjen Kopassus pada waktu itu (Desember 1995 hingga 20 Maret 1998) bertanggungjawab atau setidak-tidaknya patut mengetahui terjadinya peristiwa pernghilangan orang secara paksa terhadap setidak-tidaknya yang dilakukan oleh Tim Mawar.

Adapun keterlibatan dari yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain dalam bentuk pemberian perintah kepada pelaksana operasi yang kemudian membentuk Tim Mawar atau setidak-tidaknya mengetahui dan membiarkan terjadinya tindakan penculikan dan penahanan di Poskotis Cijantung yang dilakukan oleh pasukan yang berada dibawah kendali yang efektif dari yang bersangkutan."

Selanjutnya, melalui surat KOMNAS HAM tertanggal 21 November 2006 menyerahkan berkas penyelidikan ke Kejaksaan Agung dan merekomendasikan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan.

KontraS
Edisi Melawan Lupa

21.19 rmolsumsel.com - Agum Gumelar: Jangankan ...

um gumelar: jangank

KANTOR BERITA POLITIK
RMOLSUMSEL.COM
RAKYAT MERDEKA ONLINE GROUP

HOME RMOL.CO POLITIK EKONOMI SOSIAL KRIMINAL SELEB BUDAYA RAGAM

Share |

Agum Gumelar: Jangankan Jadi Presiden, Nyapres Saja Prabowo Harusnya Malu

Senin, 07 April 2014 , 19:25:00 WIB

PRABOWO SUBIANTO/NET

RMOL. Sosok Prabowo Subianto memiliki nilai minus di mata Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar. Menurut Agum, Prabowo Subianto tidak layak memimpin Indonesia.

"Saya tahu persis siapa dia. Karena bekas anak buah saya. Jangankan menjadi presiden, untuk mencalonkan diri sebagai presiden saja harusnya dia malu," kata Agum yang tak lain adalah bekas komandan Prabowo saat berdinas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

"Berawal pada kasus 98, sebuah kasus yang terjadi di jajaran Kopassus penculikan beberapa aktifis terjadi. Pada kasus ini, Prabowo lah tersangkanya," sambung dia.

Agum mengatakan kasus penculikan beberapa aktifis ini

nasional.kompas.com

Fachrul Razi: Saya Tahu Tabiat Prabowo, Kurang Pantas Jadi Presiden - Kompas.com

News / Nasional

Fachrul Razi: Saya Tahu Tabiat Prabowo, Kurang Pantas Jadi Presiden

Rabu, 11 Juni 2014 | 09:43 WIB

wo Subianto menyampaikan orasinya saat berkampanye di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa mpanye tersebut massa dari Sahabat ARB dan MPS mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Pilpres 9 Juli mendatang.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Panglima ABRI Letnan Jenderal (Purn) Fachrul Razi menilai, calon presiden Prabowo Subianto kurang pantas menjadi RI-1. Penilaiannya itu berdasarkan rekam jejak Prabowo di militer.

"Saya dan teman-teman yang tahu (rekam jejak Prabowo) ingin memberikan penjelasan kepada pemilih bagaimana tabiatnya. Dengan tabiat itu, kami berpandangan dia kurang pantas jadi presiden ke depan," kata Fachrul dalam wawancara dengan *Kompas TV*, Selasa (10/6/2014).

Wawancara tersebut terkait surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang beredar luas di media sosial. Fahrul

Ratusan Kusir Delman di Kabupaten Bandung Dukung Jokowi

DKPP Berhentikan Empat Penyelenggara Pemilu

Timses Jokowi-JK Optimistis Kantongi 70 Persen Suara di Bengkulu

AKTIVITAS KELUARGA KORBAN PENCULIKAN

REKOMENDASI DPR-RI
PERIODE 2009-2014 TERKAIT KASUS PENGHILANGAN PAKSA

1. Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.

2. Merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak–pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM (sic) masih dinyatakan hilang.

3. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang.

4. Merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik Penghilangan Paksa di Indonesia.

KEMERDEKAAN

Kemerdekaan
mengajarkan aku berbahasa
membangun kata-kata
dan mengucapkan kepentingan

Kemerdekaan
mengajarkan aku berbahasa
membangun kata-kata
dan mengucapkan kepentingan
Kemerdekaan
mengajar aku menuntut
dan menulis surat selebaran
kemerdekaanlah
yang membongkar kuburan
ketakutan
dan menunjukan jalan

Kemerdekaan
adalah gerakan
yang tak terpatahkan
kemerdekaan
selalu digaris depan

Wiji Tukul
Solo, 27 Desember 1988

PROFIL
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

Kontras adalah sebuah organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang didirikan pada 20 Maret 1998. Organisasi ini diinisiasi oleh sejumlah aktivis pro-demokrasi dari berbagai latar belakang di Indonesia. Pada awal pendiriannya, KontraS memiliki fokus utama mengadvokasi kasus penculikan dan penghilangan paksa, sebuah kejahatan serius yang marak terjadi di bawah pemerintahan orde baru.

KontraS

www.kontras.org

Salah satu kasus yang diadvokasi KontraS adalah kasus Penculikan dan penghilangan paksa 23 aktivis pada tahun 1997-1998. Dari jumlah tersebut, 9 orang aktivis berhasil dikembalikan hidup-hidup, 1 orang ditemukan meninggal dunia, sedangkan 13 orang masih hilang hingga saat ini.

Setelah pemerintahan orde baru jatuh, KontraS berkembang menjadi organisasi HAM dengan mandat advokasi yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada kasus penculikan/ penghilangan paksa. KontraS juga melakukan advokasi terhadap beragam isu dan kasus, khususnya yang berdimensi hak sipil dan politik, diantaranya penyiksaan, hukuman mati, brutalitas aparat TNI-POLRI, dll.

Sejauh ini KontraS hadir di tujuh provinsi, diantaranya Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Informasi lebih lanjut kunjungi www.kontras.org

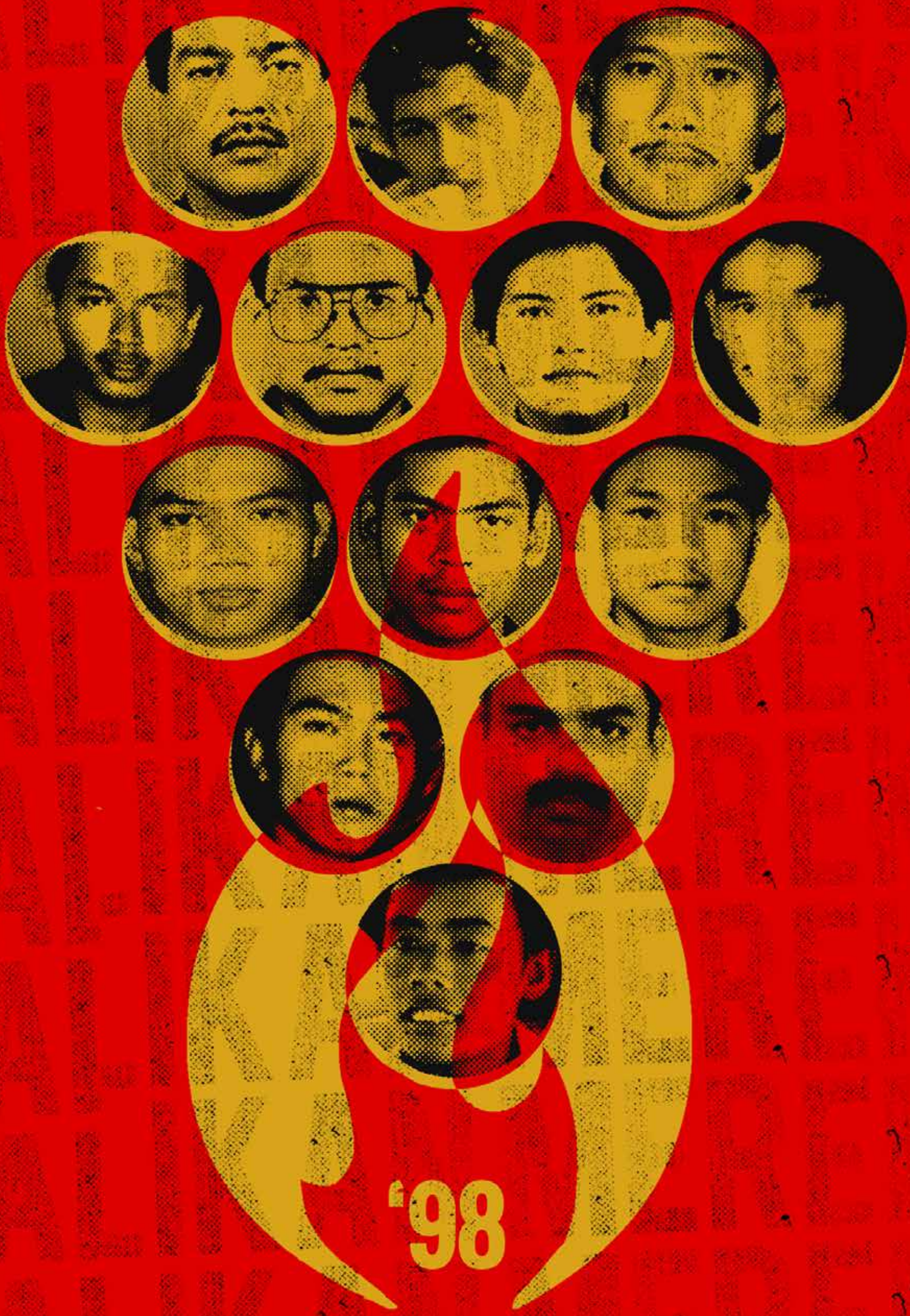
'98